

RINGKASAN

**Siti Mawaddah
220510279**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
DALAM PEMBANGUNAN JALAN DESA
(STUDI PENELITIAN DI DESA SEI
NAHODARIS KECAMATAN PANAI
TENGAH)**

**(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., dan Dr.
Hadi Iskandar, S.H., M.H.,)**

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di wilayah desa. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat desa adalah infrastruktur jalan yang layak untuk menunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun dalam kenyataannya, di Desa Sei Nahodaris masih ditemukan jalan rusak, pembangunan belum optimal, kurangnya transparansi, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan hukum Pemerintah Desa Sei Nahodaris dalam pembangunan jalan desa serta hambatan pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini deskriptif, menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sei Nahodaris memiliki kewenangan dalam pembangunan jalan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun pelaksanaannya belum optimal karena memiliki hambatan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, kondisi geografis, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki perencanaan melalui musyawarah desa, mengoptimalkan Dana Desa, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait sesuai prinsip pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 78, dan Pasal 79 UU Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sei Nahodaris disarankan meningkatkan tata kelola pembangunan jalan melalui perencanaan partisipatif, transparansi Dana Desa, dan pengawasan bersama masyarakat serta BPD. Selain itu, kapasitas aparatur dan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat, serta partisipasi masyarakat ditingkatkan agar pembangunan jalan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan desa.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Desa, Pembangunan Jalan Desa, Yuridis Empiris, Hambatan Pembangunan, Desa Sei Nahodaris.

SUMMARY

**SITI MAWADDAH
220410279**

**THE AUTHORITY OF THE VILLAGE
GOVERNMENT IN THE COSTRUCTION OF
VILLAGE ROADS (RESEARCH STUDY IN
SEI NAHODARIS VILLAGE, PANAI
TENGAH DISTRICT)**

**(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., dan Dr.
Hadi Iskandar, S.H., M.H.,)**

Village development is an important part of national development because the majority of Indonesia's population lives in rural areas. One of the basic needs of rural communities is proper road infrastructure to support economic activities, education, healthcare, and social mobility. Normatively, Law Number 6 of 2014 concerning Villages grants authority to village governments to carry out development in a participatory, transparent, and accountable manner. However, in reality, Sei Nahodaris Village still faces damaged roads, suboptimal development, lack of transparency, and limited community participation.

The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. This research is descriptive in nature, using data obtained through interviews, observations, and document studies. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively to answer the research problems.

The results of the study indicate that the Sei Nahodaris Village Government has the authority to build village roads based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, but its implementation has not been optimal due to obstacles such as limited budget, apparatus capacity, geographical conditions, and less than optimal community participation. Efforts made include improving planning through village deliberations, optimizing Village Funds, and increasing coordination with related parties in accordance with the principles of participatory and accountable village development as regulated in Article 73, Article 78, and Article 79 of the Village Law.

Based on the research findings, it is recommended that the Sei Nahodaris Village Government improve road development governance through participatory planning, transparency in the use of Village Funds, and supervision involving the community and the Village Consultative Body (BPD). In addition, the capacity of village officials and coordination with the regional government need to be strengthened, while community participation should be increased so that road development can be effective and in accordance with village needs.

Keywords: Village Government Authority, Village Road Development, Empirical Juridical, Development Obstacles, Sei Nahodaris Village.